

Memahami Akar, Dinamika, dan Pelajaran Berharga dari Peristiwa Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Oleh Pusat Studi Teknologi dan Kebijakan Publik. Diolah dari berbagai sumber dan perlu diverifikasi kembali oleh badan yang berwenang jika untuk kebutuhan penelitian ilmiah dan produk hukum

2025 - www.pstkp.org

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
I. Pendahuluan.....	3
Latar Belakang Peristiwa.....	3
Pengantar Singkat Pemberontakan RMS.....	3
II. Analisis Pemberontakan Republik Maluku Selatan.....	4
A. Hakikat dan Tujuan Pemberontakan RMS.....	4
B. Tokoh Kunci dan Aktor Terlibat.....	5
Pimpinan dan Pendiri RMS:.....	5
Tokoh Militer dan Diplomat Pemerintah Indonesia:.....	5
Keterlibatan Mantan KNIL dan Pihak Pro-Belanda:.....	6
C. Kronologi Peristiwa Penting.....	8
D. Lokasi Geografis Pemberontakan.....	11
E. Akar Penyebab dan Motivasi Pemberontakan.....	12
F. Jalannya Pemberontakan dan Penumpasan oleh Pemerintah.....	14
Strategi RMS dalam Membangun Kekuatan dan Perlawanan:.....	14
Upaya Damai Pemerintah Indonesia (Misi Dr. J. Leimena):.....	14
Operasi Militer Penumpasan:.....	14
III. Dampak Pemberontakan Republik Maluku Selatan.....	17
Dampak Jangka Pendek:.....	17
Dampak Jangka Panjang:.....	17
IV. Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Peristiwa RMS.....	19
Pentingnya Persatuan Nasional dan Keutuhan Wilayah:.....	19
Urgensi Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Regional:.....	19
Pendekatan Komprehensif dalam Resolusi Konflik Separatisme:.....	20
Manajemen Stigma dan Pentingnya Rekonsiliasi Pasca-Konflik:.....	21
Peran Sejarah dalam Membentuk Identitas dan Kebijakan Nasional.....	21
V. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	22
Kesimpulan.....	22
Rekomendasi:.....	22
Karya yang dikutip.....	23

I. Pendahuluan

Latar Belakang Peristiwa

Pasca Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memasuki periode krusial yang sarat dengan masalah. Bangsa ini tidak hanya harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, tetapi juga dihadapkan pada tugas besar untuk mengkonsolidasikan wilayah dan membangun struktur negara yang kokoh. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan pada tahun 1949 menjadi titik balik penting, menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan sebuah negara federal yang terdiri dari berbagai negara bagian, di antaranya adalah Negara Indonesia Timur (NIT).¹

Periode awal tahun 1950-an menandai masa peralihan dari RIS menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkuat persatuan nasional. Namun, proses unifikasi ini justru menimbulkan ketegangan dan pergolakan di berbagai daerah, termasuk Maluku. Wilayah-wilayah tersebut merasa kepentingan mereka terancam atau tidak terakomodasi secara memadai dalam struktur negara kesatuan yang baru.¹ Perubahan dari bentuk negara federal ke negara kesatuan, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat persatuan, secara tidak langsung menciptakan titik-titik gesekan bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya menikmati tingkat otonomi tertentu atau memiliki keluhan spesifik dalam kerangka federal. Tindakan unifikasi itu sendiri, yang bertujuan menyelesaikan fragmentasi pasca-kolonial, secara paradoks memicu konflik internal baru seperti Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan bangsa pasca-kemerdekaan, terutama yang melibatkan perubahan struktural signifikan, secara inheren rentan terhadap resistensi internal jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati dan inklusif.

Pengantar Singkat Pemberontakan RMS

Di tengah gejolak konsolidasi nasional tersebut, muncullah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), sebuah gerakan separatis yang secara resmi diproklamasikan pada 25 April 1950.¹ Tujuan utama gerakan ini adalah untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mendirikan negara sendiri.¹ Berpusat di wilayah selatan Maluku, khususnya pulau Ambon, Seram, dan Buru⁵, pemberontakan RMS menjadi salah satu masalah serius terhadap keutuhan

wilayah dan persatuan bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya.¹

II. Analisis Pemberontakan Republik Maluku Selatan

A. Hakikat dan Tujuan Pemberontakan RMS

Pemberontakan RMS adalah gerakan separatisme yang secara terang-terangan mendeklarasikan pemisahan diri dari Indonesia. Proklamasi ini dilakukan pada 25 April 1950.¹ Tujuan utamanya adalah untuk melepaskan wilayah Maluku Selatan yang meliputi Seram, Ambon, dan Buru dari pangkuan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan membentuk negara merdeka sendiri.¹ Motif di balik pemberontakan ini sangat berkaitan erat dengan "faktor kepentingan" (vested interest) dari kelompok tertentu.⁵

Gerakan ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan kuat untuk mempertahankan bentuk negara federal yang ada sebelumnya, sebagai penolakan terhadap proses kembalinya RIS ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Ada anggapan di kalangan kelompok RMS bahwa pemerintah Indonesia saat itu, yang berpusat di Jawa dan Sumatra, kurang memperhatikan wilayah lain, sehingga menimbulkan perasaan terasingkan.⁴ Sentimen anti-Jawa juga disebarkan, dengan klaim bahwa orang Maluku tidak ingin dijajah oleh orang Jawa.¹⁰

Data secara eksplisit menyatakan tujuan RMS adalah separasi dan menghubungkannya dengan keinginan mempertahankan negara federal serta sentimen anti-Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut bukan hanya tentang struktur politik (federal vs. kesatuan), tetapi juga sangat terjalin dengan persepsi marginalisasi etnis dan regional. "Ketimpangan" yang disebutkan dalam berbagai sumber mengarah pada keluhan sosial-ekonomi mendasar yang kemudian dipolitisasi dan dibingkai sebagai perjuangan melawan "penjajahan Jawa". Ini menyiratkan bahwa perbedaan ideologis (federalisme vs. unitarisme) seringkali menjadi kedok bagi kebencian yang lebih dalam terkait distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan identitas budaya di negara yang baru terbentuk. Ketahanan sentimen semacam itu dapat menjadi ancaman signifikan terhadap kohesi nasional, bahkan setelah kemerdekaan formal.

B. Tokoh Kunci dan Aktor Terlibat

Pemberontakan RMS melibatkan sejumlah tokoh penting dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemberontak dan pemerintah Indonesia. Keterlibatan mereka membentuk dinamika konflik dan menentukan arah peristiwa.

Pimpinan dan Pendiri RMS:

- Dr. Christian Robert Steven Soumokil: Beliau adalah tokoh sentral dan pemimpin utama pemberontakan RMS, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT).¹ Soumokil adalah dalang di balik proklamasi RMS dan secara tegas menolak semua upaya damai yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.¹³ Sebelum memimpin RMS, ia juga terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz dan berhasil melarikan diri ke Maluku.² Soumokil ditunjuk sebagai Presiden RMS.² Ia akhirnya ditangkap pada 2 Desember 1963 di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati yang dieksekusi pada 12 April 1966.³
- Ir. J.A. Manusama: Salah satu tokoh kunci pendiri RMS yang turut menyebarkan semangat anti-pemerintah, termasuk narasi bahwa orang Maluku tidak ingin dijajah oleh orang Jawa.³ Ia kemudian menjadi pemimpin RMS dalam pengasingan di Belanda.⁶
- J.H. Manuhutu: Tokoh yang memproklamasikan terbentuknya RMS pada 25 April 1950.³ Ia sempat menjabat sebagai Presiden RMS sebelum Soumokil mengambil alih posisi tersebut pada 3 Mei 1950.¹⁰ Manuhutu ditangkap pada awal November 1950 setelah Ambon berhasil dikuasai pemerintah dan kemudian dijatuhi hukuman penjara.¹⁰
- D.J. Samson: Ditunjuk sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang RMS (APRMS) yang dibentuk pada 9 Mei 1950.¹⁰
- Dr. J.P. Nikijuluw: Ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, pada 27 April 1950.¹⁰

Tokoh Militer dan Diplomat Pemerintah Indonesia:

- Dr. J. Leimena: Diutus oleh pemerintah Indonesia sebagai kepala delegasi untuk melakukan pendekatan damai dan perundingan dengan pihak RMS, namun upayanya tidak berhasil dan ditolak oleh Soumokil.²
- Kolonel A.E. Kawilarang: Memimpin operasi militer penumpasan RMS, yang dikenal sebagai "Operasi Militer" atau KOMPAS MALSEL.³ Ia juga merupakan Panglima TT VII Tentara dan Teritorium Indonesia Timur (TTIT) yang

mengeluarkan instruksi blokade laut terhadap Ambon.¹²

- Letnan Kolonel Slamet Riyadi: Salah satu pemimpin kunci dalam operasi militer penumpasan RMS, yang gugur di medan laga saat pertempuran merebut Benteng Nieuw Victoria di Ambon.¹⁰
- Mayor Achmad Wiranatakusumah & Mayor Suryo Subandrio: Keduanya adalah pemimpin kelompok pasukan APRIS yang dikerahkan dalam operasi penumpasan RMS.⁹

Keterlibatan Mantan KNIL dan Pihak Pro-Belanda:

Pemberontakan RMS sangat diperkuat oleh bekas prajurit KNIL (Koninklijk Nederlands(ch)-Indische Leger) dan pasukan Baret Hijau yang sebelumnya terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz.² Banyak dari mereka merasa kecewa dengan pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia dan memiliki loyalitas terhadap Belanda.¹⁸ Keberadaan RMS di Belanda sebagai pengungsi yang menolak bersatu dengan Indonesia, dan janji bantuan Belanda untuk kemerdekaan mereka, menunjukkan adanya dukungan eksternal dan warisan kolonial yang kompleks.¹⁹

Kehadiran tokoh-tokoh seperti Soumokil (mantan Jaksa Agung NIT) dan mantan tentara KNIL menyoroti bahwa gerakan separatis pasca-kolonial seringkali memanfaatkan struktur administratif dan personel militer yang sudah ada dari era kolonial. Individu-individu ini memiliki keterampilan organisasi, pelatihan militer, dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk memobilisasi perlawanan. Kekecewaan mereka terhadap negara Indonesia yang baru, khususnya pergeseran dari federalisme (yang mungkin menawarkan mereka lebih banyak kekuasaan atau mempertahankan status mereka) ke unitarisme, memberikan motivasi pribadi dan profesional yang kuat. Ini menunjukkan bahwa warisan administrasi dan militer kolonial, alih-alih menghilang, seringkali muncul kembali sebagai kekuatan destabilisasi jika integrasi mereka ke dalam kerangka nasional baru tidak ditangani secara efektif atau jika keluhan mereka diabaikan.

Tabel 1: Tokoh Kunci Pemberontakan RMS dan Peran Mereka

Nama Tokoh	Afiliasi	Jabatan/Peran Kunci	Nasib/Akhir
Dr. Christian Robert Steven Soumokil	RMS	Pemimpin utama, mantan Jaksa Agung NIT, Presiden RMS	Ditangkap (1963), dieksekusi mati (1966) ⁶

Ir. J.A. Manusama	RMS	Pendiri RMS, pemimpin RMS di pengasingan	Memimpin RMS di pengasingan ⁶
J.H. Manuhutu	RMS	Proklamator RMS, Presiden pertama RMS	Ditangkap (1950), dijatuhi hukuman penjara ³
D.J. Samson	RMS	Panglima Tertinggi Angkatan Perang RMS (APRMS)	- ¹⁰
Dr. J.P. Nikijuluw	RMS	Wakil Presiden RMS untuk luar negeri (Den Haag)	- ¹⁰
Dr. J. Leimena	Pemerintah Indonesia	Kepala delegasi misi damai	Upaya diplomasi ditolak RMS ²
Kolonel A.E. Kawilarang	Pemerintah Indonesia	Pemimpin operasi militer penumpasan RMS, Panglima TT VII TTIT	Berhasil menumpas pemberontakan ⁶
Letnan Kolonel Slamet Riyadi	Pemerintah Indonesia	Pemimpin operasi militer penumpasan RMS	Gugur dalam pertempuran (1950) ¹⁰
Mayor Achmad Wiranatakusumah	Pemerintah Indonesia	Pemimpin kelompok pasukan APRIS	Terlibat dalam operasi militer ⁹
Mayor Suryo Subandrio	Pemerintah Indonesia	Pemimpin kelompok pasukan APRIS	Terlibat dalam operasi militer ⁹

C. Kronologi Peristiwa Penting

Pemberontakan Republik Maluku Selatan berlangsung dalam beberapa fase penting, dimulai dengan persiapan hingga penumpasan militer dan keberlanjutan gerakan di pengasingan.

- Proklamasi RMS: Pemberontakan RMS secara resmi diproklamasikan pada 25 April 1950.¹ Ini menjadi titik awal dimulainya gerakan separatis ini.
- Fase-fase Upaya Penumpasan oleh Pemerintah Indonesia:
 - Awal Upaya Damai: Sebelum proklamasi, pada 13 April 1950, Dr. Soumokil telah mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon, dan pada 23 April 1950, ia menyelenggarakan rapat rahasia di Tulehu yang menghasilkan kesepakatan proklamasi RMS.¹ Menanggapi proklamasi tersebut, pada 27 April 1950, Pemerintah RIS mengirim misi damai yang dipimpin oleh Dr. J. Leimena ke Maluku Selatan.¹⁰ Namun, upaya diplomasi ini ditolak mentah-mentah oleh Soumokil, yang hanya bersedia berunding jika melibatkan United Nation Commission for Indonesia (UNCI).¹²
 - Blokade Daerah Maluku Selatan: Karena upaya damai tidak membuahkan hasil, pemerintah Indonesia terpaksa mengambil langkah blokade terhadap Pulau Ambon. Kebijakan ini didelegasikan kepada Panglima TT VII Tentara dan Teritorium Indonesia Timur (TTIT), Kolonel AE Kawilarang, dengan instruksi yang dikeluarkan pada Juli 1950 untuk menjadikan Maluku sebagai daerah tertutup dari laut, darat, dan udara.¹²
 - Operasi Militer: Setelah blokade, pemerintah RI memutuskan untuk melaksanakan operasi militer yang diberi nama "KOMANDO PASUKAN MALUKU SELATAN" (KOMPAS MALSEL), di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang, yang kemudian diserahkan kepada Letkol. Slamet Riyadi.³
 - Operasi Malam (Merebut Pulau Buru): Dimulai pada 14 Juli 1950, pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)/TNI berhasil mendarat di Pulau Buru dan membebaskan Namlea pada 16 Juli 1950.⁶
 - Operasi Fajar (Merebut Pulau Seram): Setelah Pulau Buru dibebaskan, operasi dilanjutkan ke Pulau Seram pada 21 Juli 1950, di mana pasukan berhasil menduduki Piru dan Amahai.¹²
 - Serangan Umum Senopati (Merebut Pulau Ambon): Ini adalah operasi

militer gabungan yang paling krusial untuk merebut Pulau Ambon.

- Senopati I: Dilaksanakan dari 28 September hingga 2 November 1950, bertujuan menghancurkan pusat pasukan RMS di Tulehu dan Hitu, namun menghadapi kesulitan dan tidak mencapai tujuan dalam waktu singkat.¹²
- Senopati II: Dilaksanakan pada 3 November 1950, dengan pasukan dibagi menjadi tiga grup. Pertempuran sengit terjadi, termasuk insiden gugurnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi di Benteng Victoria.¹⁰ Kota Ambon berhasil dikuasai penuh oleh pasukan APRIS antara 8 hingga 15 November 1950.¹²
- Operasi Masohi: Setelah penguasaan Ambon, pasukan APRIS melanjutkan pengejaran terhadap Dr. Soumokil dan sisa-sisa pasukan RMS di Pulau Seram melalui Operasi Masohi. Operasi ini berlangsung lama karena sulitnya medan dan informasi yang minim.¹²
- Penangkapan dan Eksekusi Dr. Soumokil: Dr. Soumokil akhirnya tertangkap pada 2 Desember 1963 di Pulau Seram.⁶ Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer dan eksekusi dilaksanakan pada 12 April 1966 di Pulau Obi¹³ atau Kepulauan Seribu, Jakarta.³
- Keberlanjutan RMS dalam Pengasingan: Meskipun perlawanan militer utama berhasil ditumpas pada November 1950 dan pemimpin utamanya dieksekusi pada 1966, sebagian pemimpin dan pendukung RMS melarikan diri ke Belanda dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan.³ RMS di pengasingan masih eksis hingga saat ini, meskipun aspirasi politiknya cenderung berkurang dari kemerdekaan penuh menjadi fokus pada kesejahteraan masyarakat Maluku di Belanda.¹⁶

Kronologi ini secara jelas menunjukkan pergeseran dari pemberontakan bersenjata terbuka (1950-1966) ke fase berkepanjangan "pemerintahan di pengasingan" dan aktivisme berkelanjutan dari diaspora di Belanda. Ini bukan hanya urutan peristiwa; ini menandakan transformasi dalam sifat konflik. Kemenangan militer oleh Indonesia tidak sepenuhnya memadamkan ideologi atau gerakan RMS, melainkan memaksanya untuk beradaptasi dan bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda (politik diaspora, pelestarian budaya, tindakan simbolis sesekali seperti pengibaran bendera). Hal ini menyiratkan bahwa menumpas pemberontakan secara militer hanyalah satu bagian dari resolusi konflik; keluhan mendasar dan komitmen ideologis dapat bertahan dan

berkembang, membutuhkan strategi jangka panjang untuk rekonsiliasi dan integrasi, terutama ketika komunitas diaspora yang signifikan ada. "Stigma" yang terkait dengan RMS di Maluku adalah konsekuensi langsung dari perjuangan ideologis yang berkepanjangan dan belum terselesaikan ini, menyoroti dampak sosial dan psikologis dari konflik semacam itu.

Tabel 2: Kronologi Peristiwa Kunci Pemberontakan RMS

Tanggal/Periode	Peristiwa	Keterangan Singkat
13 April 1950	Rapat Dr. Soumokil di Ambon	Persiapan proklamasi RMS ¹
23 April 1950	Rapat Rahasia di Tulehu	Kesepakatan proklamasi RMS ²
25 April 1950	Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS)	Deklarasi kemerdekaan RMS di Ambon ¹
27 April 1950	Misi Damai Dr. J. Leimena	Pemerintah RIS mengirim delegasi untuk berunding ¹⁰
3 Mei 1950	Soumokil Menggantikan Manuhutu	Soumokil diangkat sebagai Presiden RMS ¹⁰
9 Mei 1950	Pembentukan APRMS	Angkatan Perang RMS dibentuk ¹⁰
Juli 1950	Blokade Pulau Ambon	Pemerintah Indonesia memberlakukan blokade laut, darat, udara ¹²
14 Juli 1950	Operasi Malam (Pulau Buru) Dimulai	Pendaratan pasukan APRIS di Pulau Buru ⁶
16 Juli 1950	Pembebasan Namlea	Pasukan APRIS berhasil menguasai Namlea ¹²
21 Juli 1950	Operasi Fajar (Pulau Seram) Dimulai	Pasukan APRIS bergerak ke Pulau Seram, menduduki Piru dan Amahai ¹²

28 September - 2 November 1950	Serangan Umum Senopati I (Pulau Ambon)	Upaya pertama merebut Ambon, menghadapi kesulitan ¹²
3 November 1950	Serangan Umum Senopati II (Pulau Ambon)	Operasi puncak, pertempuran sengit, Letkol Slamet Riyadi gugur ¹⁰
8 - 15 November 1950	Kota Ambon Dikuasai Penuh	APRIS berhasil menguasai seluruh Kota Ambon ¹²
Awal November 1950	Penangkapan J.H. Manuhutu dan Menteri RMS	Pemimpin RMS awal ditangkap di Ambon ¹⁰
1960-1965	Operasi Masohi (Pengejaran di Seram)	Pengejaran sisa pasukan RMS dan Soumokil di Pulau Seram ¹²
2 Desember 1963	Penangkapan Dr. Soumokil	Soumokil tertangkap di Pulau Seram ⁶
12 April 1966	Eksekusi Dr. Soumokil	Soumokil dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi ⁶

D. Lokasi Geografis Pemberontakan

Pemberontakan RMS memiliki pusat geografis yang jelas dan melibatkan beberapa lokasi penting selama berlangsungnya konflik.

- Pusat Pemberontakan: Gerakan RMS berpusat di wilayah selatan Maluku ⁷, dengan Ambon sebagai markas pusat utama.¹ Pulau-pulau besar yang menjadi wilayah inti RMS adalah Ambon, Seram, dan Buru.⁵ Lokasi ini dipilih karena nilai strategis dan historisnya, mengingat Ambon secara historis merupakan pusat kolonial yang strategis, dan pulau-pulau tersebut kemungkinan menawarkan medan yang cocok untuk perang gerilya, terutama Seram di mana Soumokil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun.⁶

- Lokasi Operasi Militer dan Penangkapan Tokoh: Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpas RMS tersebar di beberapa pulau. Operasi Malam dilakukan di Pulau Buru, Operasi Fajar dan Operasi Masohi di Pulau Seram, dan Serangan Umum Senopati di Pulau Ambon.¹² Dr. Soumokil, sebagai pemimpin utama, akhirnya ditangkap di Pulau Seram⁶ dan dieksekusi di Pulau Obi¹³ atau Kepulauan Seribu, Jakarta.⁶
- Basis RMS di Pengasingan: Setelah penumpasan militer, sebagian pemimpin dan pendukung RMS melarikan diri dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Den Haag, Belanda.³ Belanda menjadi basis eksternal bagi kelanjutan ideologi dan aktivitas RMS di panggung internasional. Pembentukan pemerintahan di pengasingan di Belanda menyoroti dimensi transnasional konflik, menunjukkan bagaimana pemberontakan lokal dapat memanfaatkan hubungan kolonial historis untuk mempertahankan keberadaan politik dan advokasinya di panggung internasional, bahkan tanpa kontrol teritorial. Ini menunjukkan bahwa benteng geografis dan basis eksternal sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kekuatan simbolis gerakan separatis.

E. Akar Penyebab dan Motivasi Pemberontakan

Pemberontakan RMS tidak muncul dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai dimensi: politik, sosial-ekonomi, dan sejarah.

- Faktor Politik: Penolakan Pembubaran NIT dan Pembentukan NKRI:
 - Pemberontakan RMS berakar pada kondisi politik yang tidak menentu di Maluku setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan masa peralihan RIS.¹
 - Penyebab utamanya adalah penolakan keras terhadap pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) dan penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Tokoh-tokoh RMS, terutama Soumokil, berkeinginan kuat untuk mempertahankan bentuk negara federal yang diyakini lebih mengakomodasi kepentingan daerah mereka.¹
 - Gerakan ini juga merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan unitaris (pendukung NKRI) dan federalis (pendukung RIS/negara bagian) yang telah berkembang sejak tahun 1946, serta terkait erat dengan pergolakan di Makassar, khususnya pemberontakan Andi Aziz pada awal

1950, di mana Soumokil juga memiliki keterlibatan.¹

- Faktor Sosial-Ekonomi: Ketimpangan Pembangunan dan Perhatian Pusat:
 - Salah satu keluhan utama kelompok RMS adalah anggapan bahwa pemerintah Indonesia saat itu lebih memfokuskan perhatian dan pembangunan pada wilayah Jawa dan Sumatra, menyebabkan wilayah lain, termasuk Maluku, merasa terasingkan dan kurang diperhatikan.⁴
 - Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah ini menimbulkan kecemburuan sosial yang signifikan di luar Pulau Jawa, yang menjadi pemicu sejumlah pemberontakan di berbagai daerah.¹¹
 - Sentimen ini diperkuat oleh tokoh RMS seperti Manusama, yang secara terang-terangan menyebarkan semangat anti-pemerintah dengan menyatakan bahwa orang Maluku tidak ingin dijajah oleh orang Jawa.¹⁰
- Faktor Sejarah: Warisan Kolonial dan Kepentingan Golongan:
 - Pemberontakan ini juga dimotivasi oleh kekecewaan yang mendalam di kalangan bekas prajurit KNIL (Tentara Kolonial Hindia Belanda) yang tidak puas dengan pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia.¹⁸ Banyak di antara mereka memiliki loyalitas pro-Belanda dan melihat kesempatan untuk memisahkan diri dari NIT yang akan dilebur ke NKRI.⁶
 - Konflik ini berkaitan erat dengan faktor kepentingan (vested interest) dari beberapa tokoh yang memiliki kekuasaan dan pengaruh pada masa Negara Indonesia Timur (NIT), yang khawatir kehilangan posisi dan hak istimewa mereka dalam struktur negara kesatuan.¹

Analisis ini mengungkapkan bahwa RMS tidak didorong oleh satu penyebab tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks faktor politik, sosial-ekonomi, dan sejarah. Perbedaan politik mengenai federalisme vs. unitarisme diperkuat oleh persepsi marginalisasi ekonomi ("ketimpangan pembangunan") dan loyalitas historis terhadap kekuatan kolonial (mantan KNIL). Hal ini menunjukkan bahwa gerakan separatis seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam dan belum terselesaikan yang berasal dari proses dekolonisasi, integrasi nasional yang tidak merata, dan kegagalan untuk mengatasi keluhan regional. "Perasaan terasingkan" dan "tidak ingin dijajah oleh orang Jawa" menunjukkan kegagalan dalam membentuk identitas nasional yang benar-benar inklusif dan distribusi kekuasaan serta sumber daya yang adil di tahun-tahun awal kemerdekaan. Ini

menyiratkan bahwa pembangunan bangsa adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya membutuhkan deklarasi politik tetapi juga upaya aktif untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan pengakuan bagi semua kelompok konstituen.

F. Jalannya Pemberontakan dan Penumpasan oleh Pemerintah

Dinamika pemberontakan RMS melibatkan strategi perlawanan dari pihak pemberontak dan respons berlapis dari pemerintah Indonesia.

Strategi RMS dalam Membangun Kekuatan dan Perlawanan:

Soumokil secara aktif mengumpulkan kekuatan militer untuk mendukung gerakan separatisnya.⁵ Kekuatan militer RMS diperkuat secara signifikan oleh pasukan bekas KNIL dan pasukan Baret Hijau yang sebelumnya terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz.² Setelah proklamasi pada 25 April 1950, RMS juga melakukan tindakan agresif seperti menangkap orang-orang yang mendukung pemerintahan RIS di wilayah Maluku.³ Ketika Ambon berhasil dikuasai oleh pemerintah Indonesia, pusat pemerintahan dan angkatan perang RMS dipindahkan ke Pulau Seram, di mana mereka melanjutkan perlawanan dalam bentuk perang gerilya yang berkepanjangan.¹⁰

Upaya Damai Pemerintah Indonesia (Misi Dr. J. Leimena):

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pertama-tama memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah RMS. Pada 27 April 1950, Dr. J. Leimena diutus sebagai kepala delegasi untuk melakukan perundingan damai di Ambon.² Tujuan misi ini adalah untuk mengajak para pemberontak bersatu kembali dalam NKRI dan menghindari pertumpahan darah.¹² Namun, upaya ini ditolak mentah-mentah oleh Dr. Soumokil, yang bersikeras hanya akan berunding jika United Nation Commission for Indonesia (UNCI) turut serta dalam pembicaraan.¹²

Operasi Militer Penumpasan:

Menyusul kegagalan upaya damai, pemerintah Indonesia terpaksa mengambil langkah militer.

- Blokade: Pemerintah memberlakukan blokade laut, darat, dan udara terhadap Pulau Ambon pada Juli 1950, di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang.¹²
- Operasi Militer (KOMPAS MALSEL): Operasi militer gabungan ini dipimpin oleh

Kolonel A.E. Kawilarang, yang kemudian diserahkan kepada Letkol. Slamet Riyadi.³

- Operasi Malam (Merebut Pulau Buru): Dimulai pada 14 Juli 1950, pasukan APRIS/TNI berhasil mendarat di Pulau Buru dan menguasai Namlea pada 16 Juli 1950.⁶
- Operasi Fajar (Merebut Pulau Seram): Setelah Buru, operasi dilanjutkan ke Pulau Seram pada 21 Juli 1950, berhasil menduduki Piru dan Amahai.¹²
- Serangan Umum Senopati (Merebut Pulau Ambon): Ini adalah puncak operasi militer untuk merebut Ambon.
 - Senopati I (28 September - 2 November 1950): Meskipun bertujuan menghancurkan pusat RMS di Tulehu dan Hitu, operasi ini menghadapi perlawanan sengit dan mengalami kesulitan dalam mencapai target awal.¹²
 - Senopati II (3 November 1950): Dengan strategi yang diperbaiki, pasukan dibagi menjadi tiga grup. Pertempuran sengit terjadi, termasuk gugurnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi di Benteng Victoria. Kota Ambon akhirnya berhasil dikuasai penuh oleh APRIS antara 8 hingga 15 November 1950.¹⁰
- Operasi Masohi (Pengejaran di Seram): Setelah Ambon dikuasai, pasukan APRIS melanjutkan pengejaran terhadap Dr. Soumokil dan sisa-sisa pasukan RMS di Pulau Seram. Operasi ini berlangsung lama, dari tahun 1960 hingga 1965, karena medan yang sulit dan persembunyian Soumokil.¹⁰ Dr. Soumokil akhirnya tertangkap pada 2 Desember 1963 di Pulau Seram dan dieksekusi pada 12 April 1966.³

Pendekatan pemerintah terhadap RMS melibatkan urutan yang jelas: tawaran diplomatik awal diikuti oleh tindakan militer ketika diplomasi gagal. Hal ini menunjukkan kalkulus strategis di mana resolusi damai lebih diutamakan untuk menghindari pertumpahan darah, tetapi kekuatan militer dianggap perlu ketika kedaulatan negara secara langsung ditantang dan jalur diplomatik telah habis. Penjelasan rinci tentang operasi militer menyoroti skala dan kompleksitas penumpasan pemberontakan semacam itu, menunjukkan sumber daya dan korban yang signifikan yang terlibat. "Operasi Masohi" yang berkepanjangan lebih lanjut menggarisbawahi bahwa keberhasilan militer dalam merebut wilayah tidak serta merta berarti pemberantasan total suatu gerakan, terutama ketika pemimpinnya bersembunyi, yang mengarah pada konflik intensitas rendah yang

berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi negara yang efektif terhadap separatisme membutuhkan kombinasi fleksibilitas diplomatik dan kemampuan militer yang tegas, dengan pemahaman yang jelas bahwa setelahnya mungkin masih melibatkan operasi keamanan jangka panjang.

Tabel 3: Perbandingan Upaya Penumpasan RMS (Diplomasi vs. Militer)

Jenis Upaya	Tujuan	Tokoh Kunci Terlibat	Hasil/Dampak
Diplomasi	Mengajak RMS bergabung kembali ke NKRI secara damai, menghindari pertumpahan darah ¹²	Dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, Pelupessy, Dr. Rehatta ¹²	Ditolak mentah-mentah oleh Dr. Soumokil; RMS hanya bersedia berunding jika melibatkan UNCI ¹²
Militer	Menumpas pemberontakan bersenjata, mengembalikan kedaulatan RI atas Maluku ⁶	Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol. Slamet Riyadi, Mayor Achmad Wiranatakusumah, Mayor Suryo Subandrio ³	Kota Ambon berhasil dikuasai penuh (Nov 1950); Dr. Soumokil tertangkap (1963) dan dieksekusi (1966); Perlawanan bersenjata utama berakhir ⁶

III. Dampak Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Pemberontakan Republik Maluku Selatan meninggalkan jejak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang memengaruhi Maluku dan Indonesia secara keseluruhan.

Dampak Jangka Pendek:

- **Korban Jiwa:** Dampak paling langsung dan tragis adalah banyaknya korban yang berjatuh dari kedua belah pihak selama masa perlawanan bersenjata.³ Salah satu tokoh militer penting yang gugur adalah Letnan Kolonel Slamet Riyadi dalam pertempuran merebut Benteng Nieuw Victoria di Ambon.¹⁰
- **Migrasi Pengungsi:** Terjadi gelombang migrasi sekitar 15.000 pendukung RMS ke Belanda, yang kemudian menjadi basis eksternal bagi kelanjutan gerakan RMS.³
- **Ketidakstabilan Keamanan dan Politik:** Pemberontakan ini menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik yang parah antar kelompok di wilayah Maluku.¹⁰ Hubungan antar kelompok masyarakat di Maluku terganggu, dan ada kekhawatiran akan terpecahnya NKRI.¹⁸
- **Aksi Terorisme:** Beberapa kejadian terorisme oleh anggota RMS juga tercatat di Belanda, seperti insiden pembajakan kereta api.¹⁰
- **Hubungan Indonesia-Belanda Terdampak:** Munculnya pemberontakan ini juga turut berdampak pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.¹⁰
- **Penangkapan Tokoh RMS:** Presiden pertama RMS, J.H. Manuhutu, dan Perdana Menteri RMS, Wairisal, beserta sembilan menteri lainnya ditangkap setelah Kota Ambon berhasil dikuasai pada awal November 1950. Mereka kemudian dijatuhi hukuman penjara.¹⁰

Dampak Jangka Panjang:

- **Perang Gerilya Berlanjut:** Meskipun pusat pemberontakan di Ambon berhasil dikuasai pada tahun 1950, perang gerilya masih berlanjut di Pulau Seram hingga tahun 1962, yang berujung pada penangkapan Soumokil pada 1963 dan eksekusinya pada 1966.¹⁰

- Stigma Sosial dan Budaya: Salah satu dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah melekatnya stigma RMS pada masyarakat Maluku. Stigma ini masih diasosiasikan dengan budaya Maluku dan telah menyebabkan pembatalan beberapa proyek pembangunan nasional serta menghambat kerjasama transnasional antara masyarakat Maluku dengan diaspora di Belanda.¹⁷ Istilah-istilah budaya Maluku sering dicurigai memiliki kaitan dengan RMS, bahkan menyebabkan penangkapan individu yang menggunakan atribut budaya tertentu.¹⁷ Akibatnya, masyarakat Maluku secara psikologis merasa minder dan secara politik relatif tidak memiliki posisi tawar, cenderung menerima setiap kebijakan pemerintah karena takut dikaitkan dengan RMS.¹⁷
- Penerapan Hukum Diskriminatif: Pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari pemerintah kolonial Belanda masih digunakan untuk menjerat tahanan politik Maluku. Penerapan pasal-pasal ini dinilai tidak sesuai dengan paham demokrasi dan bertentangan dengan kebebasan berekspresi, dengan dugaan diskriminasi dibandingkan perlakuan terhadap aksi serupa di daerah lain.¹⁷
- Pengaruh terhadap Stabilitas Nasional: Peristiwa RMS menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan yang menunjukkan masalah berkelanjutan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰ Konflik ini memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia mengenai pentingnya pendekatan komprehensif terhadap gerakan separatis.¹⁰
- Keberlanjutan Gerakan di Pengasingan: Meskipun secara militer ditumpas, RMS tetap eksis dengan pemerintahan di pengasingan di Belanda. Namun, aspirasi politik mereka kini lebih tereduksi pada keinginan akan terpenuhi hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat Maluku yang hidup di Belanda, dibandingkan dengan impian kemerdekaan penuh.¹⁹

Dampak-dampak tersebut melampaui penumpasan militer langsung, bermanifestasi sebagai luka sosial, psikologis, dan politik jangka panjang. "Stigma" adalah sebuah fenomena penting yang perlu diperhatikan: ini bukan hanya ingatan sejarah tetapi kekuatan aktif yang menghambat pembangunan, menumbuhkan ketakutan, dan menekan partisipasi demokratis di Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan resolusi militer yang "berhasil" terhadap separatisme dapat meninggalkan luka sosial yang dalam yang mempengaruhi generasi mendatang, menghambat rekonsiliasi dan pembangunan yang adil. Keberadaan RMS yang berkelanjutan di pengasingan dan evolusinya dari tuntutan kemerdekaan menjadi fokus pada kesejahteraan diaspora menyoroti sifat adaptif

gerakan semacam itu dan kebutuhan bagi pemerintah untuk mengatasi akar penyebab ketidakpuasan, bukan hanya manifestasi bersenjata. Masalah penegakan hukum yang diskriminatif semakin memperburuk masalah, melanggengkan rasa ketidakadilan dan menghambat penyembuhan yang sejati.

IV. Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Peristiwa RMS

Peristiwa Pemberontakan Republik Maluku Selatan menawarkan serangkaian pelajaran berharga yang relevan bagi pembangunan bangsa dan tata kelola negara, khususnya dalam konteks menjaga persatuan dan mengatasi konflik internal.

Pentingnya Persatuan Nasional dan Keutuhan Wilayah:

Pemberontakan RMS menjadi pengingat yang kuat akan betapa vitalnya menjaga persatuan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah keragaman suku, budaya, dan kepentingan.¹¹ Konflik ini menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi dapat muncul dari dalam, bahkan setelah kemerdekaan, jika ada ketidakpuasan yang mendalam dan tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah pusat.¹¹ Penekanan berulang pada "persatuan nasional" dalam konteks RMS menyiratkan bahwa persatuan nasional bukanlah sesuatu yang diberikan hanya dengan mendeklarasikan kemerdekaan. Ini adalah proyek berkelanjutan yang membutuhkan pemeliharaan dan upaya aktif yang konstan. Pemberontakan RMS berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa perpecahan internal, jika dibiarkan tanpa penanganan, dapat meningkat menjadi konflik bersenjata, mengancam fondasi negara itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus secara proaktif bekerja untuk membangun dan memperkuat identitas nasional bersama yang mengakomodasi keragaman regional dan etnis, daripada berasumsi bahwa persatuan akan secara alami menang.

Urgensi Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Regional:

Salah satu pemicu utama pemberontakan RMS adalah persepsi ketimpangan

pembangunan dan perhatian yang terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, yang menimbulkan kecemburuan sosial di wilayah lain.⁴ Pelajaran ini menekankan urgensi pemerataan pembangunan dan alokasi sumber daya yang adil di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif diperlukan untuk mencegah terulangnya sentimen separatisme di masa depan, dengan memastikan bahwa setiap daerah merasa menjadi bagian integral dari kemajuan nasional.¹¹ Berbagai sumber secara eksplisit menghubungkan "ketimpangan pembangunan" dan "perhatian yang terpusat di Jawa" dengan motivasi di balik RMS. Disparitas ekonomi dan marginalisasi yang dirasakan bukan hanya masalah sosial-ekonomi tetapi juga keluhan politik yang kuat yang dapat memicu gerakan separatis. Ketika suatu daerah merasa terabaikan secara ekonomi atau dieksploitasi oleh pusat, hal itu mengikis rasa memiliki dan legitimasi mereka terhadap pemerintah pusat, membuat mereka rentan terhadap ideologi separatis. Ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi yang adil dan otonomi daerah bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi tetapi merupakan pilar fundamental keamanan dan stabilitas nasional, yang secara langsung mempengaruhi kohesi politik.

Pendekatan Komprehensif dalam Resolusi Konflik Separatisme:

Pemerintah Indonesia dalam menangani RMS menggunakan kombinasi pendekatan damai (diplomasi melalui misi Dr. J. Leimena) dan militer (operasi penumpasan).² Kegagalan diplomasi awal menunjukkan bahwa solusi militer mungkin tak terhindarkan dalam menghadapi masalah kedaulatan yang serius, namun juga penting untuk selalu mencoba jalur damai terlebih dahulu. Pelajaran ini menggarisbawahi pentingnya strategi multi-dimensi yang tidak hanya berfokus pada penumpasan militer, tetapi juga pada penanganan akar masalah sosial-ekonomi dan politik yang melatarbelakangi konflik.¹⁰ Hal ini mencakup pemahaman bahwa kemenangan militer tidak selalu berarti akhir dari masalah. Meskipun operasi militer berhasil menumpas pemberontakan bersenjata, keberadaan RMS yang berkelanjutan di pengasingan dan stigma yang masih ada menunjukkan bahwa kemenangan militer saja tidak cukup untuk resolusi konflik yang sejati. Konflik ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi ancaman keamanan langsung tetapi juga keluhan mendasar, mendorong rekonsiliasi, dan memastikan keadilan serta pembangunan jangka panjang. Ini menyiratkan bahwa respons negara terhadap separatisme harus berkembang melampaui tindakan hukuman untuk mencakup keadilan restoratif, tata kelola yang inklusif, dan upaya berkelanjutan untuk membangun kepercayaan

dan identitas bersama.

Manajemen Stigma dan Pentingnya Rekonsiliasi Pasca-Konflik:

Dampak jangka panjang dari RMS, terutama stigma yang melekat pada masyarakat Maluku, telah menghambat pembangunan dan kebebasan berekspresi, serta menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan.¹⁷ Pelajaran ini menunjukkan bahwa penanganan pasca-konflik harus mencakup upaya serius untuk menghilangkan stigma, menjamin hak-hak sipil, dan mempromosikan rekonsiliasi yang tulus antara pemerintah dan masyarakat, serta antar kelompok masyarakat itu sendiri.¹⁷ Pemerintah perlu memberikan jaminan dan edukasi kepada masyarakat Maluku agar tidak ada ketakutan berlebihan terkait stigma RMS, serta meninjau kembali penerapan pasal makar yang diskriminatif.¹⁷ Diskusi rinci tentang "stigma" adalah sebuah pemahaman yang mendalam. Hal ini mengungkapkan bahwa dampak konflik meluas ke struktur psikologis dan sosial suatu komunitas, memengaruhi kehidupan sehari-hari, peluang pembangunan, dan bahkan kebebasan berekspresi. Ketakutan akan dikaitkan dengan RMS, yang mengarah pada penyensoran diri dan penerimaan pasif terhadap kebijakan pemerintah, adalah konsekuensi jangka panjang yang kritis. Ini menyiratkan bahwa rekonsiliasi pasca-konflik harus melampaui perjanjian formal; itu membutuhkan upaya yang disengaja untuk mengatasi trauma kolektif, membangun kembali kepercayaan, mempromosikan dialog terbuka, dan memastikan bahwa narasi sejarah tidak melanggengkan diskriminasi atau ketakutan. Tanpa mengatasi "stigma" ini, perdamaian sejati dan partisipasi demokratis tetap sulit dicapai.

Peran Sejarah dalam Membentuk Identitas dan Kebijakan Nasional

Peristiwa RMS adalah bagian integral dari sejarah pembentukan NKRI dan menunjukkan kompleksitas proses tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, jalannya, dan dampak RMS sangat penting untuk membentuk kebijakan yang lebih baik di masa depan, terutama terkait otonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan penanganan konflik di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah ketidakpuasan.¹⁸ Pemberontakan RMS, sebagai peristiwa sejarah, memberikan pelajaran konkret untuk tata kelola kontemporer, khususnya mengenai otonomi daerah dan manajemen konflik.¹⁸ Hal ini menyoroti bahwa keluhan historis, jika tidak ditangani atau salah ditangani, dapat muncul kembali

dan menantang stabilitas nasional. Ini menyiratkan bahwa pembuat kebijakan perlu terlibat dengan sejarah tidak hanya sebagai catatan masa lalu tetapi sebagai kekuatan dinamis yang membentuk realitas saat ini dan masalah di masa depan. Belajar dari kesalahan masa lalu, seperti pembangunan yang terpusat atau ketidakpekaan terhadap aspirasi regional, dapat menginformasikan strategi tata kelola yang lebih inklusif dan efektif, terutama di negara yang beragam seperti Indonesia.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Pemberontakan Republik Maluku Selatan merupakan salah satu episode krusial dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia, yang secara fundamental menguji ketahanan dan integritas negara kesatuan yang baru terbentuk. Konflik ini dipicu oleh kombinasi kompleks dari faktor politik, termasuk penolakan keras terhadap pembubaran Negara Indonesia Timur dan transisi ke negara kesatuan; faktor sosial-ekonomi, yang mencakup persepsi ketimpangan pembangunan dan perhatian pusat yang tidak merata; serta faktor historis, seperti warisan loyalitas mantan prajurit KNIL dan kepentingan golongan yang terancam.

Pemerintah Indonesia merespons pemberontakan ini dengan upaya diplomasi yang intens namun gagal, yang kemudian disusul oleh operasi militer skala besar. Meskipun perlawanan bersenjata utama berhasil ditumpas pada tahun 1950, pemimpin utamanya, Dr. Soumokil, baru berhasil ditangkap dan dieksekusi pada pertengahan 1960-an, menandai akhir perlawanan fisik yang signifikan. Dampak pemberontakan ini meluas dan mendalam, tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan migrasi besar-besaran, tetapi juga meninggalkan stigma sosial-politik yang masih mempengaruhi masyarakat Maluku hingga saat ini, serta keberlanjutan gerakan di pengasingan yang terus menyuarakan aspirasi mereka.

Rekomendasi:

Berdasarkan analisis mendalam mengenai Pemberontakan RMS dan pelajaran yang dapat dipetik, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat kohesi nasional dan mencegah konflik serupa di masa depan:

- Penguatan Persatuan Nasional dan Keadilan Regional: Pemerintah harus terus memperkuat persatuan nasional melalui kebijakan yang inklusif dan adil,

menjamin pemerataan pembangunan serta alokasi sumber daya yang proporsional di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki sejarah ketidakpuasan atau marginalisasi. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap daerah merasa menjadi bagian integral dari kemajuan nasional dan tidak terasingkan.

- Pendekatan Komprehensif dalam Resolusi Konflik: Pengembangan mekanisme resolusi konflik yang mengedepankan dialog, mediasi, dan pendekatan non-militer harus menjadi prioritas, dengan kekuatan militer sebagai opsi terakhir yang terukur. Fokus harus pada penanganan akar masalah sosial, ekonomi, dan politik, bukan hanya manifestasi kekerasannya, karena kemenangan militer tidak selalu berarti akhir dari masalah.
- Manajemen Stigma dan Rekonsiliasi Pasca-Konflik: Pentingnya program rekonsiliasi pasca-konflik yang komprehensif untuk menghilangkan stigma yang melekat, memulihkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta antar kelompok masyarakat itu sendiri. Ini termasuk jaminan hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi, serta peninjauan ulang penerapan hukum yang berpotensi diskriminatif, untuk memastikan keadilan dan mencegah trauma kolektif.
- Pendidikan Sejarah yang Inklusif: Mendorong penelitian sejarah yang lebih dalam dan objektif untuk memahami kompleksitas konflik seperti RMS, serta mengintegrasikan pelajaran ini ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keutuhan bangsa, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman, sehingga generasi mendatang dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih harmonis.

Karya yang dikutip

1. Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan dan Tokoh yang Berperan - detikcom, diakses Juni 19, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422609/sejarah-pemberontakan-republik-maluku-selatan-dan-tokoh-yang-berperan>
2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) - SMAN 13 Semarang, diakses Juni 19, 2025, <https://sma13smg.sch.id/materi/pemberontakan-republik-maluku-selatan-rm>

[s/](#)

3. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) - Latar Belakang, Tokoh, dan Dampaknya, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.zenius.net/blog/pemberontakan-rms-republik-maluku-selatan/>
4. Tujuan Pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 1950 | kumparan.com, diakses Juni 19, 2025,
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/tujuan-pemberontakan-republik-maluku-selatan-pada-1950-21jLZ4p0c35>
5. Tujuan Pemberontakan RMS dan Latar Belakangnya - Pijar Article, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.pijarbelajar.id/blog/tujuan-pemberontakan-rms-dan-latar-belakangnya>
6. Karya Ilmiah Gerakan Republik Maluku Selatan | PDF - Scribd, diakses Juni 19, 2025,
<https://id.scribd.com/document/445500612/KARYA-ILMIAH-GERAKAN-REPUBLIK-MALUKU-SELATAN-docx>
7. Republik Maluku Selatan (RMS): Latar Belakang dan Upaya ..., diakses Juni 19, 2025,
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/27/190919879/republik-maluku-selatan-rms-latar-belakang-dan-upaya-penumpasannya>
8. Latar Belakang Pemberontakan DI/TII dan Republik Maluku Selatan - Kompas.com, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/19/200000579/latar-belakang-pemberontakan-di-tii-dan-republik-maluku-selatan->
9. Mengetahui Tujuan Pemberontakan RMS dan Latar Belakangnya | kumparan.com, diakses Juni 19, 2025,
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengetahui-tujuan-pemberontakan-rms-dan-latar-belakangnya-20ZizjWw94y>
10. Pemberontakan Republik Maluku Selatan: Tokoh, Latar Belakang ..., diakses Juni 19, 2025,
<https://regional.kompas.com/read/2022/02/05/202453678/pemberontakan-republik-maluku-selatan-tokoh-latar-belakang-dampak-dan?page=all>
11. 7 Pemberontakan di Indonesia - Materi Sejarah Kelas 12 - Zenius Education,

- diakses Juni 19, 2025,
<https://www.zenius.net/blog/pemberontakan-di-indonesia/>
12. upaya pemerintah indonesia dalam menyelesaikan gerakan ..., diakses Juni 19, 2025,
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/4077/6586>
 13. Tokoh Pemberontakan RMS beserta Sejarah Peristiwanya | kumparan.com, diakses Juni 19, 2025,
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/tokoh-pemberontakan-rms-beserta-sejarah-peristiwanya-20kmuLYrfNs>
 14. Christiaan Robbert Steven Soumokil, Tokoh Republik Maluku Selatan 1950 - Kompas.com, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/08/090000879/christiaan-robbert-steven-soumokil-tokoh-republik-maluku-selatan-1950>
 15. Mengulas Upaya Penumpasan Pemberontakan RMS di Ambon, Maluku | kumparan.com, diakses Juni 19, 2025,
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengulas-upaya-penumpasan-pemberontakan-rms-di-ambon-maluku-218z6ndRFDx>
 16. PRESENTASI Peristiwa pemberontakan republik maluku selatan (rms) | PPT - SlideShare, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.slideshare.net/slideshow/presentasi-peristiwa-pemberontakan-republik-maluku-selatan-rms/53974776>
 17. STIGMA DIANTARA REPUBLIK MALUKU SELATAN "RMS": PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI DI MALUKU, diakses Juni 19, 2025,
<https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/6405/2154/28967>
 18. Pengaruh pemberontakan Republik Maluku Selatan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia, diakses Juni 19, 2025,
<https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/download/20299/pdf>
 19. Eksistensi Republik Maluku Selatan Sebagai Subjek Hukum Internasional - Kosmik Hukum - Universitas Muhammadiyah Purwokerto, diakses Juni 19, 2025,
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/viewFile/9662/5284>
 20. Pengaruh pemberontakan Republik Maluku Selatan terhadap kondisi sosial

politik di Indonesia | Angelina | Historiography: Journal of Indonesian History and Education, diakses Juni 19, 2025,
<https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/20299>

21. Apakah Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Negara Yang Sah Atau Sebagai Gerakan Separatis Terhadap NKRI? (Kajian Hukum Internasional) - TitaStory.id, diakses Juni 19, 2025,
<https://titastory.id/apakah-republik-maluku-selatan-rms-sebagai-negara-yan-g-sah-ataukah-sebagai-gerakan-separatis-terhadap-nkri-kajian-hukum-internasional/>
22. Kelas XII Sejarah BS press.pdf, diakses Juni 19, 2025,
<https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/k13/bukasiswa/Kelas%20XII%20Sejarah%20BS%20press.pdf>
23. Evaluasi Penanganan Konflik, diakses Juni 19, 2025,
<http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>
24. Rekonsiliasi Pasca Konflik Disikapi Semua Pihak - RRI, diakses Juni 19, 2025,
<https://www.rri.co.id/daerah/568672/rekonsiliasi-pasca-konflik-disikapi-semua-pihak>
25. KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual, diakses Juni 19, 2025,
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=919294&val=5895&title=KERJASAMA%20ANTAR%20UMAT%20BERAGAMA%20Studi%20Rekonsiliasi%20Konflik%20Agama%20di%20Maluku%20dan%20Tual>